

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perilaku Politik dimaknai sebagai cerminan dari kecenderungan individu yang kemudian berkembang menjadi tindakan kolektif. Pemilihan Walikota Denpasar Tahun 2020 ditemukan bahwa masyarakat yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya di pengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor teknis dan faktor politis. Faktor teknis seperti kendala-kendala praktis yang menghambat partisipasi masyarakat dalam memberikan suara. Beberapa rincian yang ditemukan antara lain:

- a. Pandemi Covid-19, sebanyak 19,2% orang menyatakan pandemi covid-19 menjadi pemicu utama ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS. Kekhawatiran ini didasarkan pada risiko terpapar virus, apalagi bagi kelompok rentan seperti lansia. Pembatasan mobilitas, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan kekhawatiran kerumunan menyebabkan sebagian warga memilih untuk tidak hadir di TPS.
- b. Permasalahan administratif, sebanyak 15,4% orang menyatakan bahwa permasalahan administratif seperti tidak terdaftarnya nama dalam DPT atau DPTb, serta terdaftar namun tidak menerima surat pemberitahuan memilih (Model C6-KWK), menjadikan masyarakat bingung, apatis, atau merasa kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya.

- c. Kesibukan pekerjaan, sebanyak 11,5% masyarakat Kota Denpasar menyatakan bahwa kesibukan pekerjaan juga menjadi alasan signifikan, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal atau dengan sistem kerja harian menjadikan banyak warga memutuskan untuk tetap bekerja daripada mencoblos ke TPS.

Faktor politis lebih berakar pada persepsi dan sikap terhadap sistem dan proses politik itu sendiri. Dalam penelitian ini, faktor politis terdiri dari:

- a. Ketidakpercayaan terhadap sistem politik (*political distrust*), sebanyak 23,1% masyarakat Kota Denpasar merasa bahwa proses politik tidak mencerminkan aspirasi mereka. Mereka meragukan netralitas penyelenggara pemilu, integritas kandidat, maupun efektivitas pemerintahan yang terbentuk. Akibatnya, muncul apatisme politik dan penarikan diri dari proses pemilihan.
- b. Kurangnya kompetisi yang menarik, sebanyak 11,5% orang pada Pilwali Denpasar 2020, kompetisi politik dianggap tidak memberi pilihan yang beragam atau memadai. Situasi ini membuat masyarakat merasa "tidak ada bedanya" siapa pun yang terpilih, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
- c. Kurangnya sosialisasi yang efektif, sebanyak 19,2% masyarakat Kota Denpasar menganggap bahwa sosialisasi mengenai waktu, tempat, tata cara memilih, serta informasi tentang pasangan calon dinilai tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Terutama di tengah pandemi, metode sosialisasi yang tidak adaptif

menyebabkan banyak masyarakat kehilangan akses informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan politik.

Hasil penelitian dapat disimpulkan pula bahwa budaya politik masyarakat urban Denpasar dalam Pilwali 2020 adalah budaya politik campuran, karena menunjukkan:

1. Unsur Budaya Politik Parokial

Budaya parokial ditunjukkan oleh:

- Apatisme politik, di mana sebagian warga tidak peduli terhadap pemilihan karena tidak merasa memiliki pengaruh atau keterlibatan dalam sistem politik.
- Ketidakpercayaan terhadap sistem politik, termasuk terhadap integritas kandidat dan penyelenggara pemilu.
- Minimnya pemahaman atau informasi, akibat kurangnya sosialisasi yang efektif selama pandemi, menunjukkan kurangnya kesadaran atau minat terhadap proses politik.
- Ketidakhadiran di TPS karena ketidakpastian administratif, juga mencerminkan keterputusan masyarakat dari sistem politik formal.

2. Unsur Budaya Politik Partisipan

Namun, pada sisi lain ditemukan juga:

- Keluhan terhadap kurangnya pilihan kompetitif → menandakan ada harapan terhadap proses politik dan ekspektasi atas kualitas pemimpin.

- Kesadaran atas hak pilih dan hambatan administratif, menunjukkan ada kelompok masyarakat yang sebenarnya ingin berpartisipasi, namun terbentur kendala teknis.
- Respons terhadap isu pandemi dan kebijakan pemilu juga menunjukkan kesadaran terhadap situasi politik dan sosial.
- Kombinasi antara sikap apatis (parokial) pada sebagian masyarakat yang menarik diri dari politik karena tidak percaya atau tidak merasa terhubung,
- Dan kesadaran politik (partisipan) pada kelompok lain yang sadar pentingnya pemilu, namun terkendala faktor teknis atau pilihan politik yang tidak menarik.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan bahwa perilaku golput dalam Pilwali Denpasar 2020 disebabkan oleh faktor teknis dan politis, maka disarankan sebagai berikut:

5.2.1. Perbaikan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilu

- a. Pemutakhiran data pemilih yang lebih akurat

KPU dan pihak terkait perlu meningkatkan kualitas pendataan pemilih agar tidak terjadi lagi permasalahan seperti tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT atau DPTb serta distribusi surat pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak merata.

- b. Fasilitasi pemilih di tengah kesibukan dan mobilitas tinggi

Diperlukan inovasi teknis seperti penyediaan waktu fleksibel memilih, guna memudahkan pemilih yang bekerja atau memiliki mobilitas tinggi untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

- c. Penyesuaian protokol kesehatan yang efektif dan komunikatif

Dalam konteks pandemi atau situasi darurat lain, protokol kesehatan harus disosialisasikan dengan baik agar masyarakat merasa aman datang ke TPS.

5.2.2. Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik

- a. Strategi sosialisasi yang lebih inklusif dan adaptif

Lembaga penyelenggara pemilu harus melakukan pendekatan sosialisasi yang tidak hanya formal, tetapi juga menjangkau kelompok rentan dan marginal secara langsung, termasuk lewat media sosial, komunitas lokal, hingga pendekatan berbasis budaya.

b. Pendidikan politik yang berkelanjutan

Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu bersinergi dalam memberikan pendidikan politik sejak dini. Pemilih perlu disadarkan bahwa suara mereka penting dan berpengaruh terhadap arah kebijakan publik di daerah.

c. Transparansi informasi tentang calon dan Visi Misi

Kandidat dan partai politik harus menyampaikan visi misi secara terbuka, konkret, dan mudah dipahami masyarakat agar pemilih merasa memiliki pilihan yang layak dan dapat dipercaya.

d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan

Pemerintah perlu menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan berpihak pada kepentingan rakyat agar kepercayaan publik terhadap sistem politik meningkat.